KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Muara Enim Tahun 2016 merupakan gambaran hasil yang dicapai berdasarkan kinerja kegiatan masing-masing program yang dilaksanakan oleh satuan Kerja Pengadilan Negeri Muara Enim.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Muara Enim Tahun 2017 wajib dilaksanakan sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia.

Penyajian data dan informasi seluruh aktifitas, sasaran kerja dan capaian kegiatan yang tersaji dalam LKjIP ini adalah merupakan gambaran akuntabilitas kinerja Pengadilan Negeri Muara Enim pada tahun anggaran 2017.

MUARA ENIM, JANUARI 2018
KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM

AS'AD RAHIM, SH, MH
NIP 19730115 199903 1004

IKHTISAR EKSEKUTIF

Salah satu azas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan pertanggung jawaban dari amanah atau mandat yang melekat pada suatu lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Kerja Pengadilan Negeri Muara Enim Tahun 2017 ini disusun. LKjIP ini menyajikan capaian kinerja yang merupakan pelaksanaan amanah yang diemban oleh organisasi. Walaupun Inpres No. 7 Tahun 1999 memang mensyaratkan setiap Instansi Pemerintah menyusun suatu laporan akuntabilitas, namun LKjIP ini juga merupakan kebutuhan kami dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh.

LKjIP Tahun 2017 ini menyajikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengadilan Negeri Muara Enim sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai Peradilan Tingkat Pertama, yaitu mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif, efisien, serta mendapatkan kepercayaan publik, profesional dan memberikan pelayanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau dan biaya rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR			i
IKHITSAR EKSEKUTIF			ii
DAFTAR ISI			iii
BAB I	PENDAHULUAN		
	A.	LATAR BELAKANG	1
	B.	TUGAS POKOK DAN FUNGSI	2
	C.	SISTEMATIKA PENYAJIAN	3
BAB II	PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA		
	A.	RENCANA STRATEGIS 2015-2019	5
		1. VISI DAN MISI	5
		2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	6
	B.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	7
	C.	RENCANA KINERJA TAHUN 2016	9
	D.	PENETAPAN KINERJA TAHUN 2016	10
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA		
	A.	PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2016	12
	B.	ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA	13
		1. MENINGKATNYA PENYELESAIAN PERKARA	13
		2. MENINGKATNYA TERTIB ADMINISTRASI PERKARA	26
		3. MENINGKATNYA AKSEPBILITAS PUTUSAN HAKIM	35
		4. PENINGKATAN AKSESIBILITAS MASYARAKAT TERHADAP PERADILAN	39
		5. MENINGKATNYA PENGAWASAN YANG BERKUALITAS	41
		6. MENINGKATNYA SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS	44
		7. TERSELENGGARANYA PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA	48
	C.	AKUNTABILITAS KEUANGAN	52
BAB IV	PENUTUP		
	A.	KESIMPULAN	56
	B.	SARAN	57

LAMPIRAN

1. STRUKTUR ORGANISASI
2. INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM TAHUN 2017
3. MATRIK RENSTRA 2015-2019
4. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2017
5. SK KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM TENTANG TIM PENYUSUNAN LKjIP

LAMPIRAN